

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi perangkat daerah untuk menjelaskan, mengukur capaian kinerja selama 1 Tahun secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ kepala daerah sebagai pemberi amanah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 merupakan laporan yang disusun berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Laporan ini disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja pada tim kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Secara Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Pada tabel 3.1 berikut disajikan uraian definisi indikator kinerja utama DPMPTSP pada tahun 2025.

Tabel 3.1
Uraian Definisi dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama
DPMPTSP Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target	Defenisi	Rumus Perhitungan
1.	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	30,50%	Komponen dari pengeluaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan besaran investasi dalam bentuk aset tetap yang dimiliki dan digunakan oleh unit usaha	$(PMTB/PDRB \text{ ADHK}) \times 100 \%$
2.	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	7,5%	Peningkatan nilai investasi dalam bentuk penanaman modal, yang dilakukan perusahaan maupun individu baik PMA dan PMDN, dihitung berdasarkan laporan realisasi investasi tahun n dibandingkan dengan nilai realisasi investasi n-1	$\{(Nilai \text{ investasi tahun ini} - \text{nilai investasi tahun lalu}) / \text{Nilai investasi tahun lalu}\} \times 100\%$

Sumber: Renstra Tahun 2025-2029 DPMPTSP Prov. Sumsel

Tabel 3.2
Uraian Definisi dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target	Defenisi	Rumus Perhitungan
1.	Jumlah Realisasi investasi PMA	T Rp	20,00	Investasi yang dilakukan oleh investor asing baik perorangan, perusahaan maupun badan usaha yang dihitung berdasarkan LKPM	Nilai investasi yang di capai oleh investor/proyek investasi asing
2.	Jumlah Realisasi investasi PMDN	T Rp	22,50	Investasi yang dilakukan oleh investor lokal/domestik baik perorangan, perusahaan maupun badan usaha yang dihitung berdasarkan LKPM	Nilai investasi yang di capai oleh investor/proyek investasi lokal/domestik
3.	Realisasi Investasi Total	T Rp	42,50	Total nilai dana dan aset yang benar-benar telah dikeluarkan dan diinvestasikan oleh penanam modal (baik dalam negeri maupun asing) untuk kegiatan usaha yang telah diizinkan, dan dicatat secara berkala melalui pelaporan seperti Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).	Jumlah total realisasi PMA + Jumlah Total Realisasi PMDN yang dicatat melalui pelaporan Kegiatan Penanaman Modal
4.	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP	%	10	Penambahan izin berbasis digital yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	$(\text{Jumlah perizinan periode terbaru} - \text{Jumlah perizinan periode sebelumnya}) / \text{Jumlah perizinan periode sebelumnya} \times 100 \%$
5.	Indeks Kepuasan Investor	angka	89,97	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan investor yang dilayani yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif	$(\text{Jumlah nilai persepsi tertimbang} / \text{jumlah unsur pelayanan}) \times \text{nilai dasar}$

Sumber: Renstra Tahun 2025-2029 DPMPTSP Prov. Sumsel

Berikut pada tabel 3.3 disajikan realisasi TW I-TW III berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, dan realisasi TW IV berdasarkan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum Perubahan (RPD 2024-2026)

Tujuan OPD : Meningkatkan Investasi Daerah												
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Penjabaran Target					Realisasi				
			2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif	Persentase pertumbuhan investasi (%)	8	1,76	1,92	2,48	1,84	-11,63	-2,97	-3,06	77,23	-11,63
		Nilai realisasi investasi PMA (T)	20,0	5	5	5	5	15,74	3,88	4,45	2,78	4,37
		Nilai realisasi investasi PMDN (T)	22,5	5,63	5,63	5,63	5,63	47,19	9,84	8,22	20,65	8,48
		Jumlah Investor (Unit usaha)	1200	300	300	300	300	2.392	1291	1910	1369	1265
2	Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (angka)	90,25	89,29	85,59	89,95	90,25	91,81	88,67	89,79	91,17	91,81
		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	2500	300	600	800	800	2.224	440	546	900	338

Sumber: Laporan Kinerja Triwulan I s.d Triwulan IV Tim Kerja PP dan PKPM

Pada Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dengan indikator Persentase Pertumbuhan investasi pada tahun 2025 realisasinya -11,63%. Secara keseluruhan, penurunan pertumbuhan investasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar -11,63% lebih mencerminkan perlambatan yang bersifat struktural-administratif dan siklus proyek, bukan penurunan minat investasi secara fundamental. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan penguatan iklim investasi, peningkatan peran daerah dalam pengawasan, serta perbaikan mekanisme pencatatan realisasi investasi ke depan.

Jumlah investor (unit usaha) pada tahun 2025 berjumlah 2.392 dari target 1.200 unit usaha/perusahaan, dengan capaian mencapai 199,33%.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 90,25 realisasi kinerjanya mencapai 91,81 atau tercapai 101,72%, dan mengalami persentase peningkatan sebesar 2,04 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 89,97.

Indikator jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP dengan target 2.500 izin non perizinan, hanya tercapai realisasi sebesar 2.224 izin non izin atau capaian kinerjanya hanya mencapai 88,96 %. Tetapi kemudian pada dokumen renstra target jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP berubah menjadi 1.500, artinya sasaran tersebut tercapai target dengan persentase capaian 38,05%.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 seperti yang tertuang pada tabel 3.3 tersebut diatas mengalami perubahan yang tercantum pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan pencapaian kinerja sasaran dirinci pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 Setelah Perubahan
(Renstra 2025-2029)

Tujuan OPD : Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan												
	Indikator Kinerja	Satuan	Penjabaran Target					Realisasi				
			2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	30,50	7,50	15,25	23,00	30,50	30,02	7,32	14,98	22,65	30,02
2	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	7,5	1,65	1,8	2,325	1,725	-11,63	-2,97	-3,06	77,23	-11,63

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Sekretariat

Berdasarkan tabel 3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menunjukkan kinerja investasi yang kuat dan stabil. Berdasarkan evaluasi capaian indikator makro daerah, pertumbuhan PMTB Tahun 2025 tercatat sebesar 30,02%,

mendekati target tahunan sebesar 30,50%, dengan tingkat capaian 98,43% dari target yang ditetapkan.

Perlambatan investasi pada tahun 2025 disebabkan karena tidak tercapainya target realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), hal tersebut dikarenakan Sumatera Selatan belum memiliki RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan kawasan industri yang bisa mendorong minat berinvestasi bagi investor baru terutama PMA. Sehingga sampai dengan saat ini Realisasi investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Realisasi capaian indikator kinerja kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029)

No	Indikator	Satuan	Penjabaran Target					Realisasi				
			2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	T Rp	20,00	5	5	5	5	15,74	3,88	4,45	2,78	4,37
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN	T Rp	22,50	5,625	5,625	5,625	5,625	47,19	9,84	8,22	20,65	8,48
3	Realisasi Investasi Total	T Rp	42,50	10,63	10,63	10,63	10,63	62,67	13,72	12,67	23,43	12,85
4	Persentase pertumbuhan Investasi	%	7,5	1,87	1,87	1,87	1,87	-11,63	-2,97	-3,06	77,23	-11,63
5	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP	%	10	-	-	-	10	-	-	-	-	38,05
6	Indeks Kepuasan Investor	angka	89,97	89,29	89,59	89,95	90,25	91,81	88,67	89,79	91,17	91,81

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Sekretariat

Berdasarkan tabel diatas indikator persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP pada TW IV sudah mengikuti target dalam dokumen renstra DPMPTSP tahun 2025-2029. Target persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP adalah 10%

dengan jumlah izin awal 1.500. Pada realisasinya izin yang berhasil diterbitkan adalah 2.224 izin dengan realisasi capaian 38,05%.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel

Sasaran 1 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing

Untuk mencapai sasaran mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dapat dilihat dari 2 (dua) indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Sasaran Utama 1 Tahun 2025

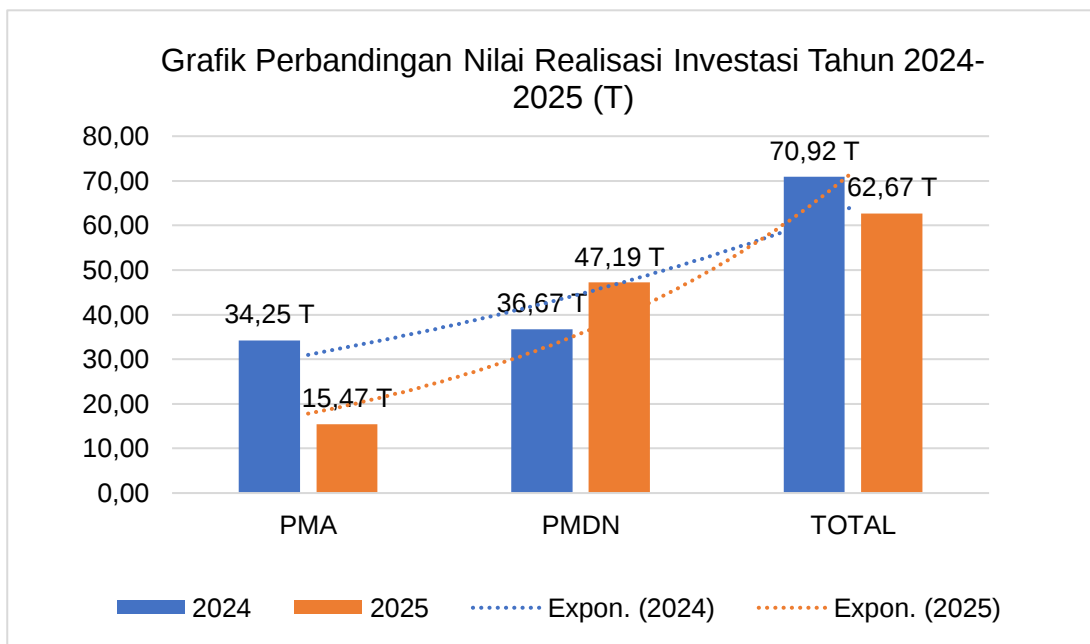
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Realisasi Ivestasi Total	T Rp	42,50	62.67	147,46%
	Nilai Realisasi Investasi PMA	T Rp	20,0	15.48	77,4%
	Nilai Realisasi Investasi PMDN	T Rp	22,5	47.19	209,73%
2	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	7,5	-11,63	-155,06

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Penhngendalian PM dan Promosi PM

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel 3.6 di atas, diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran realisasi investasi PMA dan PMDN triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 62,67 T atau tercapai 79,48% dari target investasi Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk tahun 2025 sebesar Rp. 78,85 T, dan tercapai 147,46% dari target Pemerintah Daerah Rp. 42,5 T. Apabila dibandingkan dengan data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2024, total realisasi investasi tercatat sebesar Rp.70,92 T. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp. 62,67 T. Kondisi ini menunjukkan terjadinya perlambatan realisasi investasi pada

tahun 2025, yaitu sebesar –11,63% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dan masih berada di bawah target pertumbuhan investasi yang ditetapkan sebesar 7,5%. Perlambatan kinerja investasi pada tahun 2025 ini terjadi pada investasi PMA dengan perlambatan sebesar 54,83% dari tahun 2024.

Perbandingan nilai realisasi investasi tahun 2024-2025 dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini:



Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.1.

Grafik Perbandingan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024-2025

Apabila dibandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran 1 tahun 2025 dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1
dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi PMA	T	19.13	20.47	21.90	19.5	20.00	18,39	17,77	21,88	34,25	15,47	96,13	85,97	99,90	175,64	77,35
Realisasi PMDN	T	9.14	9.79	10.47	22	22.50	16,27	23,52	25,60	36,67	47,19	178,01	85,97	244,50	166,68	209,75
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	7	7	7	8	7,5	-9,63	18,96	15,97	49,37	-11,63	1,37	646,86	220,85	617,12	-155,06

Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2021 s.d 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Berdasarkan tabel diatas realisasi investasi PMA mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021, realisasi PMA mencapai Rp 18,39 T dengan capaian 96,13%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp 17,60 T (85,97%). Tahun 2023 menunjukkan pemulihan dengan realisasi Rp 21,88 T (99,90%), dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan Rp 34,25 T (175,64%). Namun, tahun 2025 realisasi PMA mengalami penurunan drastis menjadi Rp 15,47 T dengan capaian hanya 77,35%, atau penurunan sebesar -9,83% dibandingkan tahun 2024. Penurunan pada tahun 2025 ini disebabkan oleh selesainya fase konstruksi proyek besar PT OKI Pulp & Paper Mills yang pada tahun 2024 menyumbang Rp 22,71 T, namun turun menjadi Rp 8,7 T pada tahun 2025. Selain itu, terhentinya pendelegasian wewenang pengawasan dari Pemerintah Pusat dan keterbatasan kewenangan pengawasan dalam sistem OSS RBA turut mempengaruhi kinerja PMA.

Berbeda dengan PMA, investasi PMDN menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan positif. Dari Rp 16,27 T pada tahun 2021 (178,01%), realisasi terus meningkat menjadi Rp 23,52 T (2022), Rp 25,60 T (2023), Rp 36,67 T (2024), dan mencapai Rp 47,19 T pada tahun 2025 dengan capaian luar biasa 209,75% atau peningkatan +208,75% dari tahun 2024.

Jumlah investor menunjukkan pertumbuhan eksplorisasi dari tahun ke tahun. Dari 571 perusahaan pada tahun 2021, melonjak menjadi 1.029 (2022), kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 901 perusahaan, dan mencapai puncak 4.454 perusahaan pada tahun 2024 (387,30%). Pada tahun 2025, terjadi penurunan menjadi 2.392 perusahaan (191,36%), namun tetap jauh melampaui target 1.200 perusahaan dengan capaian 199,33%. Meskipun turun 53,70% dari tahun 2024, jumlah investor 2025 masih mencerminkan minat investasi yang sangat tinggi dan mendukung diversifikasi basis investor di Sumatera Selatan.

Persentase pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2021 sebesar -9,63%, kemudian meningkat menjadi 18,96% (2022). Pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 15,97%. Puncaknya pada tahun 2024 meningkat tinggi menjadi 49,37%. Basis perbandingan pada tahun 2024 sangat tinggi akibat puncaknya investasi proyek-proyek besar menciptakan efek basis yang tinggi. Pada tahun 2025 persentase pertumbuhan nilai investasi melambat sebesar 11,63%. Hal ini dipengaruhi salah satunya karena ketergantungan berlebihan pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan yang fluktuatif mengikuti harga komoditas global.

Tabel 3.6 menggambarkan transformasi struktural investasi di Sumatera Selatan dari ketergantungan PMA menuju kekuatan PMDN yang semakin dominan. Meskipun pertumbuhan investasi tahun 2025 negatif dalam persentase, nilai absolut realisasi tetap sangat tinggi dan melampaui target. Faktor penurunan bersifat siklikal (selesainya proyek besar) dan administratif (keterbatasan kewenangan pengawasan), bukan fundamental ekonomi. Keberhasilan PMDN yang stabil dan peningkatan jumlah investor menunjukkan fundamen ekonomi daerah yang kuat, sementara tantangan PMA memerlukan perhatian khusus dalam bentuk pengembangan kawasan industri, hilirisasi komoditas, dan perbaikan kerangka regulasi pusat-daerah.

Realisasi Kinerja tahun 2025 bila dibandingkan dengan target Rencana strategis Pembangunan Daerah Renstra DPMPTSP 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 dari tahun 2025 dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target Jangka Menengah s.d Tahun 2029	Persentase Tingkat Capaian (%)
1		2	3	4	5
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	T	15,47	24,31	63,63
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN	T	47,19	27,35	172,54
3	Jumlah Investor/ LKPM	Perusahaan	2.392	7.828	30,56
4	Persentase Pertumbuhan Nilai Invetasi	%	-11,63	8	-145,37

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Dominasi PMDN dalam struktur investasi Sumatera Selatan menjadi ciri paling menonjol dari capaian tahun 2025. Realisasi PMDN mencapai Rp 47,19 T, melampaui target jangka menengah 2029 sebesar Rp 27,35 T dengan capaian 172,54%. Pencapaian luar biasa ini sekaligus menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap potensi ekonomi lokal, sekaligus berfungsi sebagai penyangga ketika PMA mengalami perlambatan signifikan. Namun kelebihan capaian pada tahun pertama periode Renstra justru mengindikasikan risiko front-loading, di mana investasi didorong oleh ekspansi proyek-proyek existing daripada pembukaan proyek baru, sehingga mengurangi ruang pertumbuhan untuk tahun-tahun berikutnya.

Sebaliknya, kinerja PMA menunjukkan kelemahan fundamental yang serius. Dengan realisasi hanya Rp 15,47 T dari target jangka menengah Rp 24,31 T, capaian PMA baru mencapai 63,63%. Kondisi ini mencerminkan minimnya daya tarik Sumatera Selatan bagi investor asing, yang disebabkan oleh belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang dan kawasan industri yang memadai, serta terhentinya pendelegasian

wewenang pengawasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi. Ketergantungan berlebih pada PMDN tanpa disertai penguatan PMA menciptakan kerentanan struktural, mengingat investasi domestik cenderung lebih sensitif terhadap fluktuasi kondisi ekonomi nasional.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah indikator pertumbuhan nilai investasi yang mencatat angka -11,63%, jauh dari target 8% dengan capaian -145,37%. Kontraksi ini bukan sekadar masalah teknis pelaporan, melainkan sinyal kritis bahwa model investasi berbasis siklus proyek besar tidak berkelanjutan. Penurunan tajam ini erat kaitannya dengan penyelesaian fase konstruksi proyek strategis seperti perluasan PT OKI Pulp and Paper Mills, yang nilai investasinya turun dari Rp 22,71 T tahun 2024 menjadi Rp 8,7 T tahun 2025. Tanpa adanya pipeline proyek baru yang signifikan, risiko stagnasi investasi menjadi sangat nyata.

Disparitas yang paling mencolok terlihat pada indikator jumlah investor atau LKPM. Meskipun nilai investasi total sangat tinggi, jumlah pelaku usaha baru mencapai 2.392 perusahaan atau 30,56% dari target jangka menengah 7.828 perusahaan. Kesenjangan ekstrem antara volume investasi dan partisipasi investor ini mengindikasikan terjadinya fenomena *growth without diffusion*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh penyebaran manfaat dan partisipasi luas pelaku usaha. Investasi terkonsentrasi pada segmen besar dan proyek ekspansi, sementara masuknya investor baru khususnya usaha kecil dan menengah sangat terbatas. Akibatnya, *multiplier effect* investasi tidak tercipta secara optimal, kesenjangan antar wilayah semakin melebar, dan potensi penyerapan tenaga kerja massal tidak terealisasi.

Secara geografis, realisasi investasi yang terkonsentrasi pada empat daerah utama yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Muara Enim, dengan kontribusi sebagian besar kabupaten dan kota lainnya di bawah 2%, semakin memperkuat argument tentang ketidakmerataan pembangunan. Ketergantungan pada lokasi-lokasi tertentu membuat total

investasi provinsi sangat rentan terhadap penundaan satu atau dua proyek besar di daerah tersebut.

Tabel 3.9
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 dari tahun 2025 dengan standar nasional

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Standar Nasional	Persentase Tingkat Capaian (%)
1		2	3	4	5
1	Nilai Realisasi Investasi	T	62,67	78,85	79,48

Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Pengendalian PM

Berdasarkan tabel 3.9 diatas nilai realisasi investasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 62,67 T atau mencapai 79,48% dari target investasi Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk tahun 2025 sebesar 78,85 T dan tercapai 147,46% dari target Renstra Tahun 2025-2029 sebesar 42,50 T. Pencapaian realisasi PMA dan PMDN pada tahun 2025 ini didukung capaian realisasi PMA sebesar Rp. 15.474.319.982.407,00 (Rp. 15,47 T) dan realisasi PMDN sebesar Rp. 47.193.731.155.747,00 (Rp. 47,19 T).

Total nilai investasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan wilayah per Kabupaten/Kota pada periode triwulan I s.d triwulan IV Tahun 2025 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 15,47 T atau melambat 54,83% bila dibandingkan capaian realisasi PMA triwulan I s.d IV tahun 2024 (Y/Y).

Adapun langkah-langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan realisasi investasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemantauan dan verifikasi data investasi dengan indikator Jumlah LKPM yang disampaikan Perusahaan secara online dengan tepat waktu. Pencapaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025 ini sebesar 863,06% dengan jumlah LKPM adalah 6.473 LKPM yang terdiri dari 6.072 LKPM PMDN dan 401 LKPM PMA. Rekapitulasi

jumlah LKPM dari Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini :

Tabel 3.10
Rekapitulasi Jumlah LKPM Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2025

Jenis PM	Jumlah LKPM					Jumlah Perusahaan				
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	TW 1	TW2	TW3	TW 4	Total
PMA	461	432	511	401	1.805	176	165	181	150	672
PMDN	6.074	9.225	6.646	6.072	28.017	1.115	1.745	1.188	1.115	2.164
Total	6.535	9.657	7.157	6.473	29.822	1.291	1.910	1.369	1.265	2.392

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

2. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian masalah pelaku usaha (PMA/PMDN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah fasilitasi kendala pelaku usaha. Untuk realisasi kinerja pada triwulan IV tahun 2025 ini tercapai sebanyak 127 pelaku usaha/perusahaan yang dibina dimana 100 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina melalui bimbingan teknis/sosialisasi dan 27 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina oleh tenaga pendamping seperti pada tabel 3.11. Sedangkan kegiatan usaha yang telah difasilitasi permasalahannya sebanyak 9 pelaku usaha. Untuk realisasi kinerja
3. pada tahun 2025 ini tercapai 386 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina, Dimana 300 pelaku usaha/Perusahaan yang dibina melalui Bimbingan Teknis/Sosialisasi, 9 pelaku usaha/perusahan yang dibina melauai fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dan 77 pelaku usaha/Perusahaan dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha oleh tenaga pendamping.

Rekapitulasi pembinaan kepada pelaku usaha tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini :

Tabel 3.11
Rekapitulasi Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Tahun 2025

Pembinaan Kepada Pelaku Usaha	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Total
Bimbingan Teknis/Sosialisasi	0	100	100	100	300
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan	0	0	3	6	9
Pendampingan Kepada Pelaku Usaha oleh Tenaga Pendamping	19	17	14	27	77
Total	19	118	117	133	386

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi

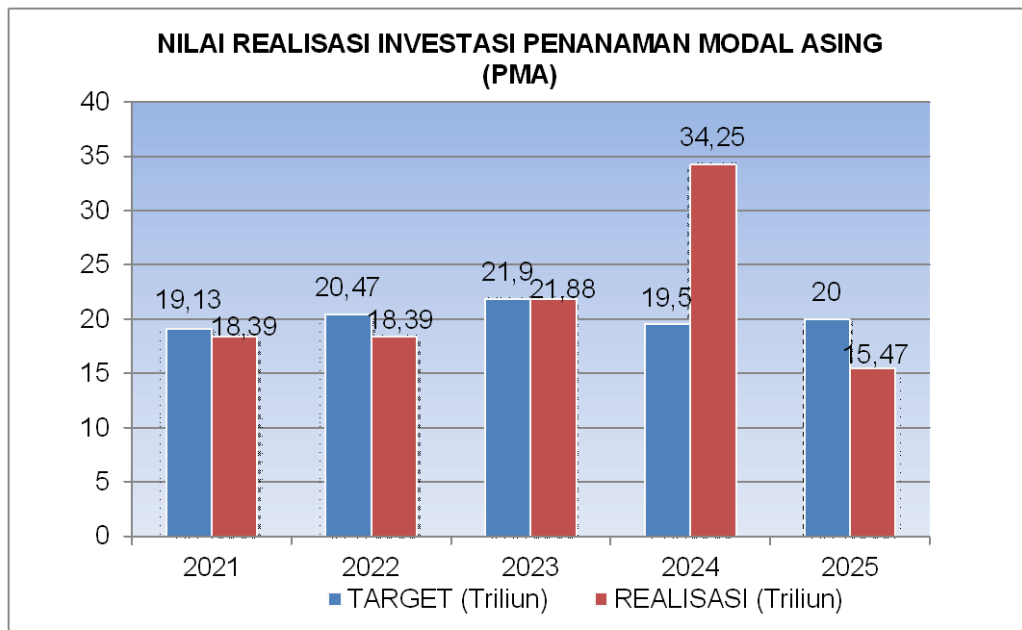


Sumber: Laporan kinerja triwulan iv pokja pengendalian PM

Gambar 3.2

Identifikasi penyelesaian permasalahan ke PT. Prasadha Aneka Limbah Indonesia di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Capaian target dan realisasi indikator investasi Penanaman Modal Asing



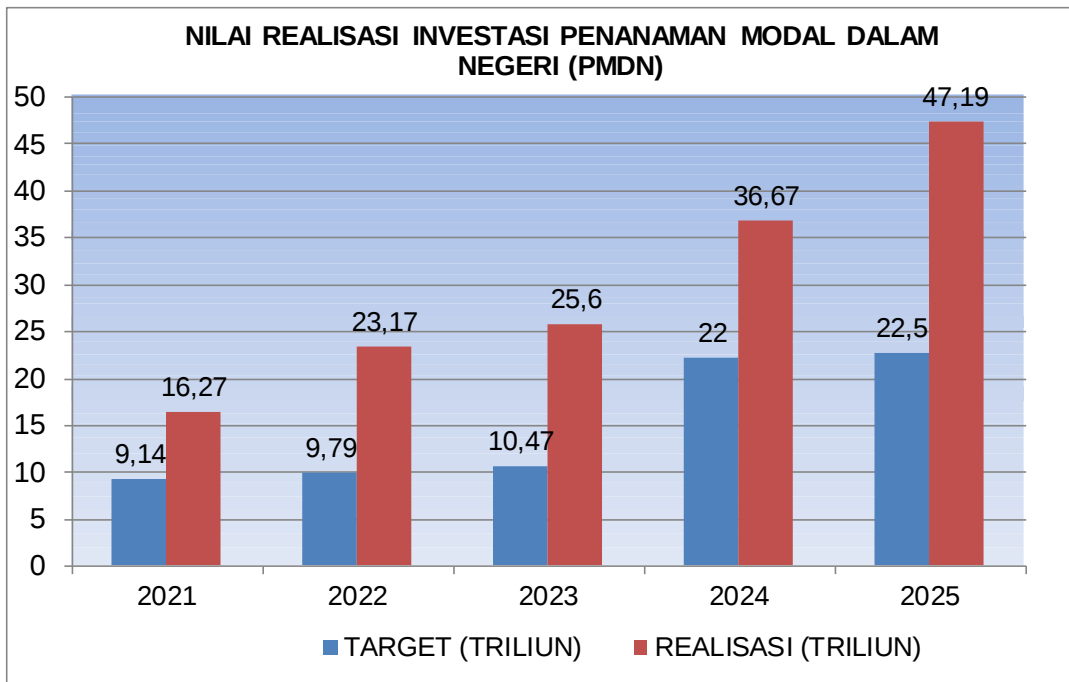
(PMA) dari tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.3
Grafik Target dan Realisasi Investasi PMA Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar 3.3 total nilai realisasi investasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan wilayah per kab/kota pada Tahun 2025 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 15.474.319.982.407,00 (Rp. 15,47 T) atau mengalami penurunan 54,83% yaitu Rp. 18.774.632.304.404,10 (Rp. 18,77 T) bila dibandingkan capaian realisasi PMA triwulan I s.d triwulan IV tahun 2024 (Y/Y). Nilai Realisasi Investasi PMA Tahun 2025 tertinggi didominasi oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Realisasi Investasi sebesar Rp. 9.274.228.386.785,00 (Rp. 9,27 T).

Capaian target dan realisasi indikator Investasi PMDN dari tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.4
Grafik Target dan Realisasi Investasi PMDN Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar 3.4 indikator kinerja nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2025 adalah 47,19 T dari target sebesar 22,50 T dengan persentase capaian 209,73% sementara target akhir Renstra (2029) adalah 51,66 T, terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai 91,35 % dari target akhir Renstra.

Terlampaiunya target Investasi PMDN seperti yang telah ditetapkan Renstra untuk target tahun 2025, Adapun faktor pendukung Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu :

1. Peningkatan citra daerah sebagai tujuan investasi wilayah yang lebih spesifik dan konkret popularitas berbagai aspek
2. Pengemasan potensi dan peluang investasi wilayah yang lebih spesifik dan konkret Investment Project Ready To Offer (IPRO) .

3. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efisien dan efisien antara lain :
 - a. Penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) dengan OPD terkait.
 - b. Peningkatan penggunaan media elektronik yang meliputi podcast, televisi, media online dan media sosial.
4. Pelaksanaan gelar promosi investasi untuk mendorong investor awaranness and willingness.
5. Fasilitasi keikutsertaan UKM pada saat promosi dalam rangka matchmaking dengan perusahaan skala besar serta pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi.
6. Kerjasama dengan pusat promosi terpadu di Negara-negara tertentu.

Salah satu upaya untuk mendukung pencapaian kinerja realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) terhadap target Tahun 2025 yaitu dengan mewujudkan Sasaran Strategis Meningkatnya pengendalian Penanaman Modal. Ada empat upaya pencapaian sasaran yang dilakukan antara lain :

 - a. Meningkatkan pemantauan dan verifikasi data investasi dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah Jumlah LKPM yang disampaikan perusahaan secara online dengan tepat waktu;
 - b. Meningkatkan fasilitas penyelesaian masalah pelaku usaha (PMA/PMDN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah fasilitasi kendala pelaku usaha.
 - c. Meningkatkan pembinaan perusahaan (PMA/PMDN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah pelaku usaha yang dibina sesuai ketentuan pelaksanaan penanaman modal (Gambar 3.5).
 - d. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah Jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme Berita Acara Pemeriksaan (BAP).



Sumber : Laporan kinerja triwulan III Tahun 2025 Pengendalian PM dan Promosi PM

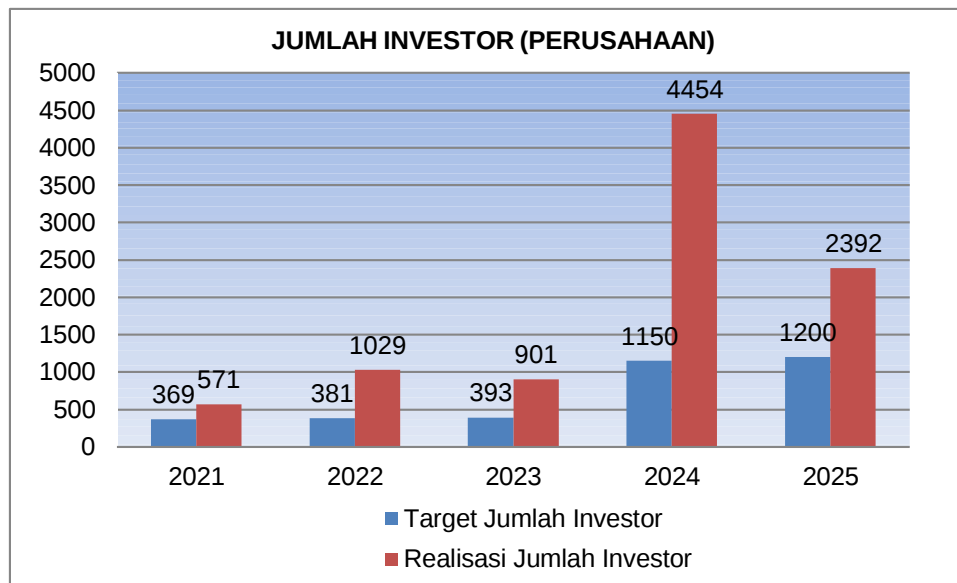
Gambar 3.5
Kegiatan Pembinaan perusahaan PMA/PMDN



Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 Pengendalian PM

Gambar 3.6
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ke PT. Muba
Global Lestari di Kab. Musi Banyuasin

Capaian target dan realisasi indikator jumlah investor dari tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.7
Grafik Jumlah Investor pada Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 3.7 realisasi indikator jumlah investor tahun 2025 adalah 2.392 Perusahaan dari target sebesar 1.200 Perusahaan dengan capaian sebesar 199,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan dimana tahun 2024 realisasi 4.454 dari target sebesar 1.150 dan capaian 387,30%.

Jumlah Investor sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai investasi serta tenaga kerja yang terserap di daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah investor yang menanamkan modal di daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berjumlah 2392 Perusahaan. Jumlah Investor pada tahun 2025 menurun sebesar 53,70 % apabila di bandingkan dengan jumlah investor pada tahun 2024. Jumlah investor pada tahun 2024 adalah 4.454 Perusahaan.

Jika dilihat berdasarkan bidang usaha sektor yang paling dominan adalah sector sekunder (10,69 T) dengan penyumbang terbesar adalah

sektor kertas dan percetakan terutama pada Industri bubur kertas dan barang dari kertas, Sub sector Industri makanan terutama industri kelapa sawit.

Untuk terus meningkatkan capaian realisasi investasi yang berasal dari PMA (Penanaman Modal Asing), DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
2. Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran dan pelaporan pada SPIPISE Online untuk melaporkan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

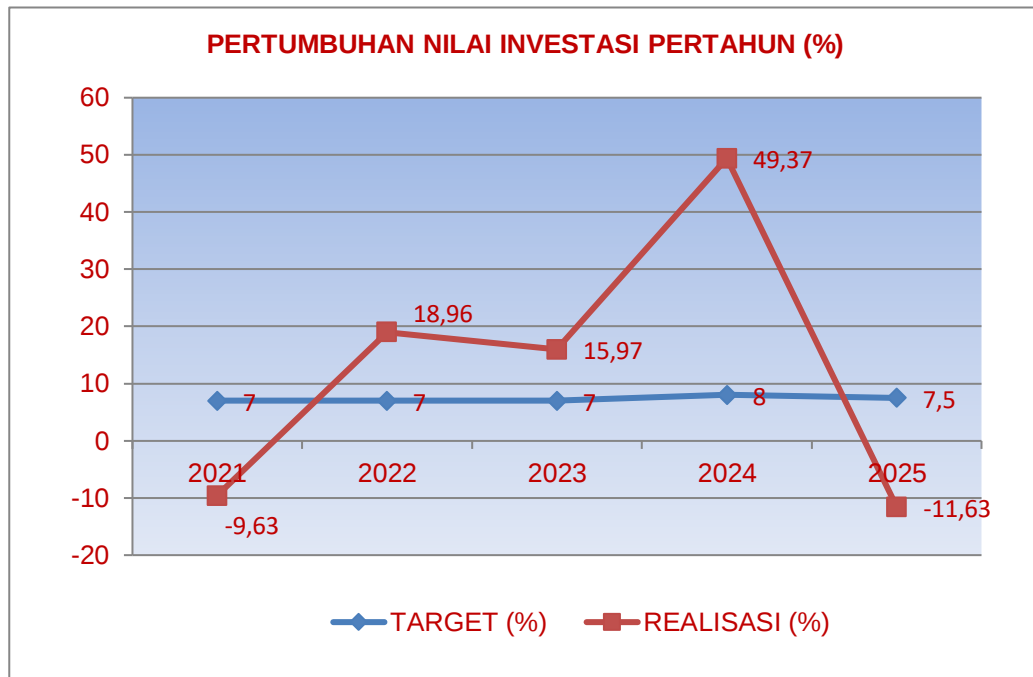


Sumber : Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.8
Business Matching antara *Crude Coconut Oil* (CCO) dan Pemerintah Provinsi Sumsel

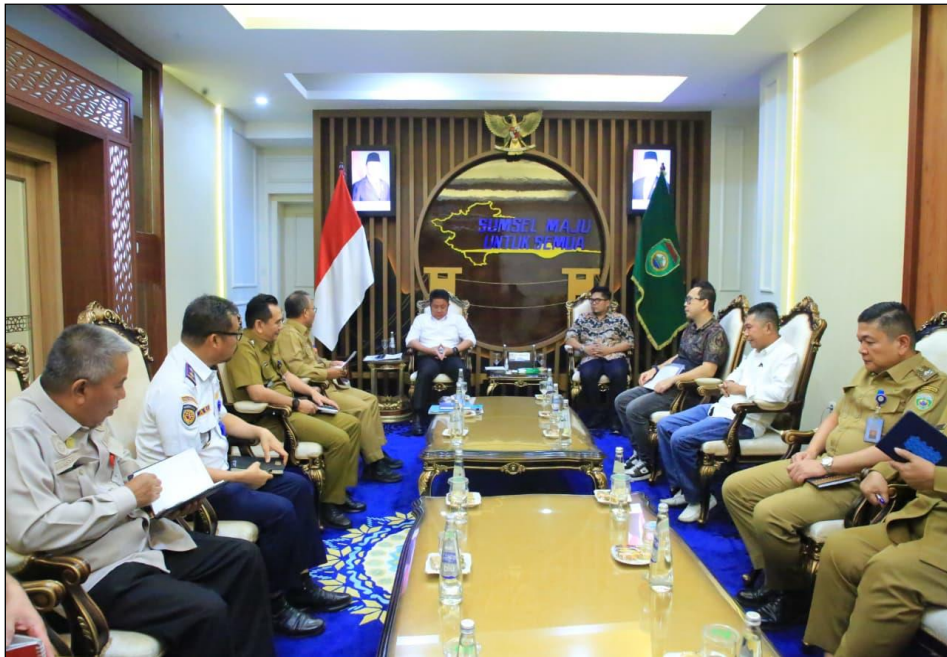
Indikator pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2025 sebanyak - 12,06 dihitung dengan Total realisasi Investasi Tahun n-Total realisasi tahun sebelumnya dibagi Total Investasi tahun sebelumnya, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dimana tahun 2024 realisasi sebesar 49,37 dari target 8% dengan persentase

capaian 617,12%. Sementara target akhir Renstra (2029) adalah 1.250 perusahaan, terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra (2029). Pertumbuhan Nilai Investasi dari Tahun 2021-2025 dapat di lihat pada grafik dibawah ini :



Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Promosi PM

Gambar 3.9
Grafik Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2021-2025



Sumber : Dokumentasi sekretariat Dpmpptsp Prov. Sumsel dan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Pokja Promosi PM

Gambar 3.10

Pembahasan Kerjasama Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik bersama PT. Vgreen Global Charging Station Investment Indonesia dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan business matching antara calon investor pelaku usaha besar maupun kecil baik dalam dan luar negeri beserta UMKM dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mempertemukan kebutuhan investasi dengan potensi daerah secara langsung dan terarah. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan calon investor/pelaku usaha guna memperoleh informasi yang komprehensif terkait peluang investasi, kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur, serta kebijakan insentif yang tersedia di Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui forum ini, pelaku usaha dapat menyampaikan rencana investasi, kebutuhan lahan, bahan baku, tenaga kerja, maupun dukungan regulasi, sementara pemerintah daerah memberikan pemaparan mengenai potensi unggulan sektor industri, pertanian, energi, pariwisata,

Dan ekonomi kreatif. Diskusi berlangsung secara interaktif sehingga tercapai kesesuaian kebutuhan (matching demand and supply) yang diharapkan berujung pada komitmen kerja sama maupun realisasi investasi.

Kegiatan business matching ini diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan investasi, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan : Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel

Sasaran 2 : Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi

Untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi dapat dilihat dari 2 (dua) indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dengan rincian pada tabel 3.12 di bawah ini :

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025		Persentase Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
1		2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Investor	Angka	89,97 (A)	91,81 (A)	102,05 %
2	Jumlah Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Digital Yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP	Angka	1500	2224	148,27 %
	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Digital yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP	Persentase	10	38.05	380.5 %
Rata-rata Capaian					210,27 %

Sumber: Laporan Kinerja Triwulan IV Kelompok kerja Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa 2 indikator sasaran yang telah ditetapkan menghasilkan capaian kinerja di atas 100% atau bermakna sangat baik. Jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP mencapai 2224 izin dari target 1500 atau dengan

kata lain persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP mencapai 38,05% dari target 10%. Indeks kepuasan investor juga mencapai target dengan persentase capaian 102,05%.

Apabila dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan realiasi dan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 2 dari Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,27	89,89	88,82	89,97	91,81	100,74	100,26	99,01	99,74	102,04
2 Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Angka	573	1.673	1.818	1.611	2.224	56,96	257,38	269,33	71,16	148,27
Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	%	0	0	0	0	38,05	0	0	0	0	148,27

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan IV Tim kerja pp

Realisasi dan capaian tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 realisasi 89,97 (A) dan capaian 99,63%, pada tahun 2023 realisasi sebesar 88,82 (A) dan capaian 99,01%. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 89,89 (A) dan capaian 100,26% dan pada tahun 2021 90,27(A) dan capaian 100,74%. Terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 sudah sangat baik. Realisasi kinerja tersebut menunjukkan bahwa unsur pelayanan persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produksi spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana sudah baik karena rata-rata dari unsur Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 dengan nilai interval 4.

Indikator jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2025 sebanyak 2.224 izin/ non izin dari target 1.500 dengan persentase capaian target 148,27 % bila dibanding dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan dimana tahun 2024 sebanyak 1.611 dan capaian 71,16%, sementara target akhir Renstra (2025) adalah 1.900 pelaku usaha, terlihat bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai target. Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP mencapai 38,05% dari target 10%. Data tersebut diambil dari aplikasi Online Single Submission Risk-Based Approach (Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko) dan melalui Aplikasi Si Cantik Cloud dan Manual.

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dari Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah (2029)

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Jangka Menengah	Persentase Tingkat Capaian (%)
1		2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,81 (A)	90,25 (A)	101,72
2	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Angka	2.224	1.900	117,05
	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Persentase	38,05	20	190.25

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan IV 2025 Pokja PP

Berdasarkan tabel 3.14 indikator indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah merupakan target akhir Renstra periode tahun 2029 terealisasi dengan nilai realisasi 91,81 dari target RPJMD Tahun 2029 90,25 dengan persentase capaian sebesar 101,72%. Hal ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Daftar Nilai Interval IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00-2,5996	25-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	2,60-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan IV 2025 Pokja PP

Pada tabel diatas nilai interval konversi IKM, maka nilai IKM Unit Pelayanan adalah 91.81. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Sangat Baik”**.

Analisis pada sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 90,25 realisasi kinerjanya mencapai 91,81 atau tercapai 101,72%, dan mengalami persentase peningkatan sebesar 2,03 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 89,97.

Analisis Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja serta upaya yang akan dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 seperti pada tabel 3.16 dibawah ini antara lain sbb :

Tabel 3.16
Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 sesuai PK Perubahan Tahun 2025

Tujuan OPD : Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan												
	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	30,50	7,50	15,25	23,00	30,50	30,02	7,32	14,98	22,65	30,02
2	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	7,5	1,65	1,8	2,325	1,725	-11,63	-2,97	-3,06	77,23	-11,63

Sumber: Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2025 pokja Perencanaan Iklim PM, Pengendalian PM dan Sekretariat

Pada tabel 3.16 diatas Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PMTB) merupakan indikator kinerja baru yang hasilnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Sepanjang tahun 2025, perkembangan PMTB menunjukkan pola progresif per triwulan. Pada Triwulan I, realisasi relatif moderat karena faktor siklus awal tahun anggaran dan tahap persiapan proyek. Memasuki Triwulan II dan III, terjadi percepatan realisasi investasi terutama pada sektor industri pengolahan dan konstruksi. Triwulan IV menjadi puncak realisasi tahunan dengan capaian kumulatif 30,02%. Meskipun terdapat deviasi tipis sebesar -0,48 poin dari target, kondisi ini bersifat teknis dan siklikal, terutama akibat pergeseran jadwal proyek multiyears dan dinamika harga komoditas global. Secara fundamental, tidak terjadi kontraksi investasi.

Struktur PMTB didominasi oleh investasi pada bangunan dan konstruksi, pengadaan mesin dan peralatan industri, serta alat berat sektor pertambangan dan perkebunan. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi daerah, perluasan infrastruktur, serta meningkatnya aktivitas hilirisasi berbasis sumber daya alam. Capaian PMTB Tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap peningkatan

kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Ke depan, diperlukan percepatan hilirisasi industri, diversifikasi sektor manufaktur, serta penguatan monitoring realisasi investasi agar pertumbuhan PMTB lebih berkelanjutan.

Persentase pertumbuhan investasi pada tahun 2025 realisasinya -11,63%. Secara keseluruhan, penurunan pertumbuhan investasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar -11,63% lebih mencerminkan perlambatan yang bersifat struktural-administratif dan siklus proyek, bukan penurunan minat investasi secara fundamental. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan penguatan iklim investasi, peningkatan peran daerah dalam pengawasan, serta perbaikan mekanisme pencatatan realisasi investasi ke depan.

Walaupun dari sisi pertumbuhan investasi terjadi perlambatan tetapi dari sisi capaian target investasi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 di tahun 2025 sebesar Rp 42,5 T, telah tercapai dengan sangat baik dengan capaian Rp 62,67 T atau mencapai 147,46%. Dengan capaian tersebut, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi investasi pada masa mendatang guna mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan.

Perlambatan kinerja investasi pada tahun 2025 ini terjadi pada investasi PMA dengan perlambatan sebesar 54,83% dari tahun 2024. Hal ini terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Selatan belum optimal karena struktur PMA masih didominasi oleh jumlah investor yang relatif terbatas namun bernilai investasi sangat besar. Kondisi ini menyebabkan realisasi investasi Sumatera Selatan sangat sensitif terhadap siklus proyek strategis tertentu. Ketika investor besar berada pada fase konstruksi padat modal, nilai realisasi meningkat signifikan, namun akan mengalami penurunan secara alamiah saat proyek memasuki fase operasional. Hal ini tercermin pada penurunan

realisasi investasi pasca fase konstruksi perluasan usaha PT OKI Pulp & Paper Mills, yang pada tahun 2024 mencatatkan realisasi sebesar Rp22,71 T, kemudian menurun menjadi Rp8,7 T pada tahun berikutnya seiring masuknya proyek ke tahap penyelesaian akhir. Pola siklus ini berdampak langsung terhadap perlambatan pertumbuhan investasi pada periode selanjutnya..

- 2) Terhentinya pendelegasian wewenang pengawasan pelaksanaan penanaman modal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2025 ini, turut memengaruhi capaian kinerja investasi. Pendelegasian wewenang sejatinya merupakan instrumen integrasi kebijakan yang memungkinkan pembagian beban kerja pengawasan secara sistematis dan berjenjang. Tanpa pendelegasian tersebut, pengawasan terhadap proyek-proyek strategis PMA menjadi kurang optimal karena keterbatasan jangkauan Pemerintah Pusat dalam memantau seluruh titik investasi secara intensif dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengendalian realisasi investasi di daerah.
- 3) Keterbatasan kewenangan pengawasan penanaman modal yang sepenuhnya mengacu pada pembagian peran dalam sistem OSS RBA menyebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang berada di luar kewenangannya, khususnya PMA. Dalam sistem OSS RBA, pengawasan PMA dan PMDN lintas provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Provinsi hanya berwenang mengawasi PMDN lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Pembatasan kewenangan ini mengurangi ruang intervensi pemerintah provinsi dalam mendorong percepatan dan optimalisasi realisasi PMA di wilayahnya.
- 4) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPMRI melakukan pengkondisian dalam verifikasi data realisasi investasi dengan menghentikan perekapan segera setelah target nasional tercapai. Kebijakan ini bertujuan menjaga agar tren capaian tahun berjalan

tidak melampaui target secara signifikan, guna menghindari penetapan target yang terlalu tinggi pada tahun berikutnya. Namun, kebijakan tersebut berdampak pada pengembalian masif LKPM yang telah disampaikan pelaku usaha untuk diakumulasikan ke periode berikutnya. Hal ini secara langsung merugikan potret capaian realisasi investasi di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan

Selain dari faktor internal tersebut, adanya faktor lainnya seperti minimnya ketersediaan kawasan industri beserta infrastruktur pendukungnya, Hilirisasi komoditi unggulan Sumsel yang berjalan lambat, penguatan dan sinkronisasi regulasi kemudahan berusaha antara pusat dan daerah yang belum berjalan optimal juga menjadi hambatan dalam peningkatan investasi daerah.

Walaupun pada investasi PMA terjadi perlambatan sebesar 54,83% tetapi Kontribusi investasi PMDN tahun 2025 ini sangat baik terutama pada sektor industri kertas dan percetakan tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, pertambangan, industri kertas dan farmasi. Hal ini terlihat pada pertumbuhan investasi PMDN yang mencapai pertumbuhan 28,69% dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan PMDN cenderung berasal dari ekspansi proyek domestik/skala lokal, misalnya pengembangan industri manufaktur, pertambangan mineral, dan sektor infrastruktur yang terus berlanjut. PMDN juga lebih cepat mencapai target lokal jika dibandingkan PMA, khususnya bila dilihat terhadap target RPJMD dibanding target nasional — artinya investasi domestik relatif lebih stabil. PMDN berperan sebagai “penyangga” utama investasi di Sumatera Selatan saat PMA melemah. Ini mencerminkan kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap potensi ekonomi lokal sangat baik.

Secara keseluruhan, penurunan pertumbuhan investasi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar –11,63% lebih mencerminkan perlambatan yang bersifat struktural-administratif dan siklus proyek, bukan penurunan minat investasi secara fundamental. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan penguatan iklim investasi, peningkatan peran

daerah dalam pengawasan, serta perbaikan mekanisme pencatatan realisasi investasi ke depan.

Walaupun dari sisi pertumbuhan investasi terjadi perlambatan tetapi dari sisi capaian target investasi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 di tahun 2025 sebesar Rp 42,5 Trilyun, telah tercapai dengan sangat baik dengan capaian Rp 62,67 Trilyun atau mencapai 147,46%. Dengan capaian tersebut, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi investasi pada masa mendatang guna mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari 5 sasaran, terdapat 4 sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi bisa dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata %Capaian Kinerja	Rata-Rata %Capaian Keuangan	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	147,46	95,66	51,8	Efisien
2	Meningkatkan Investasi Melalui Kegiatan Promosi yang Efektif	46,4	97,06	-50,66	Tidak Efisiensi karena indikator baru dan direalisasikan pada TW 4
3	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	150	91,51	58,49	Efisien
4	Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	233,33	94,05	138,95	Efisien
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko	148,27	98,74	49,53	Efisien

Sumber: Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2025

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan:

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kerjanya itu ;

1. Sasaran mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing sebesar 79,66% . Pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah program promosi penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program pengembangan iklim dan program pengelolaan data dan informasi penanaman modal

2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2 : Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi sebesar 125,16%. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah program pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tahun 2025, realisasi Belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sebesar Rp. 20.697.435.356- (*Dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*) dari anggaran sebesar Rp. 22.230.058.158,- (*Dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah*). Rincian Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.18 di bawah ini :

Tabel 3.18
Rincian Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% Capaian 2025
1	2	3	4=(3/2)*100
BELANJA DAERAH	22.230.058.158	20.697.435.356	93,11
BELANJA OPERASI	22.230.058.158	20.697.435.356	93,11
Belanja Pegawai	14.712.582.738	14.092.756.770	95,79
Belanja Barang dan Jasa	7.517.475.420	6.604.678.586	87,86
JUMLAH BELANJA OPERASI	22.230.058.158	20.697.435.356	93,11
BELANJAMODAL	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	0	0	0,00
JUMLAH BELANJA	22.230.058.158	20.697.435.356	93,11
SURPLUS/DEFISIT	22.230.058.158	20.697.435.356	93,11

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Total Belanja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 20.697.435.356,- atau 93,11% dan realisasi fisik 100%

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.20.697.435.356,- atau 93,11% dan realisasi fisik 100 %

3) Realisasi Belanja Modal

I. Realisasi Belanja Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0% dan realisasi fisik 0% (terefisiensi).

II. Realisasi Keuangan

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi $0\% \leq 65\%$: 2 kegiatan
2. Sedang, Kegiatan dengan realiasi $66\% \leq 90\%$: 0 kegiatan
3. Tinggi, kegiatan dengan realisasi $91\% \leq 100\%$: 10 kegiatan

III. Realisasi Fisik

1. Rendah, Kegiatan dengan realiasi $0\% \leq 65\%$: 0 kegiatan
2. Sedang, Kegiatan dengan realiasi $66\% \leq 90\%$: 2 kegiatan
3. Tinggi, kegiatan dengan realisasi $91\% \leq 100\%$: 10 kegiatan

Realisasi Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 3.19 di bawah ini :

Tabel 3.19
Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai	%	100	100	18,689,928,000	17,296,027,068	92.54	100	APBD	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	116,472,000	68,491,911	58.81	83	APBD	
1	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 (Renstra PD, dan Renja 2026)	2 (Renstra PD, dan Renja 2026)	38,460,000	18,218,652	47.37	100	APBD	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 (RKA-RKAP)	2 (RKA-RKAP)	26,548,500	26,132,515	98.43	100	APBD	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 (DPA-DPPA)	2 (DPA-DPPA)	26,548,500	3,350,000	12.62	30	APBD	proses revisi anggaran s/d TW 2, belanja jd tdk efektif

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP.	Laporan	4 (LKPJ, LPPD), LKJIP, SAKIP)	4 (LKPJ, LPPD), LKJIP, SAKIP)	24,915,000	20,790,744	83.45	100	APBD	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana	%	100	100	15,409,456,000	14,438,847,910	93.70	100	APBD	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	68	124	14,712,582,738	14,092,756,770	95.79	100	DAU dan APBD	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 (Adm)	12 (Adm)	644,793,262	298,828,000	46.34	100	APBD	
7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 (Verifikasi Dok)	12 (Verifikasi Dok)	34,080,000	30,580,000	89.73	100	APBD	
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 (Laporan Keuangan OPD)	1 (Laporan Keuangan OPD)	10,000,000	9,033,180	90.33	100	APBD	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18 (Laporan smt OPD)	18 (Laporan smt OPD)	8,000,000	7,649,960	95.62	100	APBD	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	%	100	100	100,000,000	97,773,200	97.77	100	APBD	
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah stel / paket pakaian Olahraga untuk aparat		-	-	-	-	-	0	APBD	Terefisiensi
11	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	22	22	100,000,000	97,773,200	97.77	100	APBD	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai	%	100	100	1,282,000,000	1,268,354,494	98.94	100	APBD	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	40,000,000	39,821,270	99.55	100	APBD	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	0	APBD	Terefisiensi
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	260,000,000	248,377,432	95.53	100	APBD	
15	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	120,000,000	119,762,935	99.80	100	APBD	
16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2160 (surat kabar)	2160 (surat kabar)	12,000,000	11,985,000	99.88	100	APBD	
17	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan perjadi	90	90	850,000,000	848,407,857	99.81	100	APBD	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang tercapai	%	100	100	-	-	-	0	APBD	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	-	-	-	0	APBD	Terefisiensi
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai	%	100	100	954,000,000	908,974,475	95.28	100	APBD	
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12,000,000	11,950,000	99.58	100	APBD	
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	500,000,000	464,224,475	92.84	100	APBD	
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	442,000,000	432,800,000	97.92	100	APBD	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional	%	100	100	28,000,000	513,585,078	62.03	70	APBD	
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	500,000,000	367,027,178	73.41	100	APBD	Palembang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peratan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	139,000,000	136,557,900	98.24	100	APBD	
24	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	189,000,000	10,000,000	5.29	10	APBD	Pemeliharaan dibatalkan karena rencana pindah kantor
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tercapainya Persentase Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal	%	7,5	-11,63	979,625,000	937,104,246	95.66	100	APBD	
8	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tingkat Capaian Penetapan Fasilitas / Insentif Penanaman Modal daerah	%	100	100	100,000,000	98,897,841	98.90	100	APBD	
25	Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara usaha besar (PMA-PMDN) dengan UMKM daerah	dokumen MoU kesepakatan	5	17 (MoU)	100,000,000	98,897,841	98.90	100	APBD	
9	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tingkat Capaian Pembuatan Peta Potensi investasi Provinsi	%	100	100	879,625,000	838,206,405	95.29	100	APBD	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
26	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen RUPM Tahun 2025-2045	1	1	294,144,000	271,007,196	92.13	100	APBD	
27	Sub Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemuktahiran data potensi investasi	Daerah	17 (Kab/kota)	17 (Kab/kota)	100,000,000	88,973,523	88.97	100	APBD	
28	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi	Dokumen kajian PPID	2 (ikan patin dan sapi)	2 (ikan patin dan sapi)	485,481,000	478,225,686	98.51	100	APBD	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Penyusunan Strategi dan Pelaksanaan promosi penanaman modal kewenangan Daerah Provinsi	%	100	100	600,000,000	582,355,026	97.06	100	APBD	
10	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tercapainya Promosi penanaman modal kewenangan daerah provinsi	%	100	100	600,000,000	582,355,026	97.06	100	APBD	
29	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	Dokumen	1 (Penyusunan Strategi Promosi)	1 (Penyusunan Strategi Promosi)	250,000,000	238,764,974	95.51	100	APBD	Kolaborasi dan kerjasama Tim Promosi PM dgn pihak lainnya yang terkait

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
30	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Dokumen	1 Pelaksanaan Promosi -4 event)	1 (Pelaksanaan Promosi -4 event)	350,000,000	343,590,052	98.17	100	APBD	Kolaborasi dan kerjasama Tim Promosi PM dgn pihak lainnya yang terkait
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	izin/non izin	1500	2,224	1,186,770,580	1,171,848,802	98.74	100	APBD	
11	Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	%	100	100	1,186,770,580	1,171,848,802	98.74	100	APBD	
31	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usah	1500	2224	1,186,770,580	1,171,848,802	98.74	100	APBD	Peran serta dan kolaborasi antar tim kerja dan Kabkota

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tercapainya nilai realisasi Invesasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	T Rp	42.50	62,67	691,985,000	633,214,807	91.51	100	APBD	
12	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha	%	100	100	691,985,000	633,214,807	91.51	100	APBD	
32	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	jumlahnya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan Usaha	32	46	383,255,000	354,942,416	92.61	100	APBD	perlunya optimalisasi pengawasan terintegrasi antar OPD teknis
33	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha	6	9	110,000,000	97,623,041	88.75	100	APBD	Perlunya kolaborasi antar OPD teknis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD)	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
34	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha ber4basis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	Pelaku Usaha	300	300	198,730,000	180,649,350	90.90	100	APBD	Perlu inovasi pembinaan melalui media digital
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tercapainya Rasio Tingkat layanan terhadap ketersediaan data dan sistem informasi Penanaman Modal	angka	2	0,75	81,749,578	76,885,407	94.05	100	APBD	
13	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	%	100	100	81,749,578	76,885,407	94.05	100	APBD	
35	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	3 (Buku database Sektoral)	7 (Buku database Sektoral)	81,749,578	76,885,407	94.05	100	APBD	Belum optimalnya upaya pengelolaan data dan informasi PP dan PM
	Jumlah : 35 Sub Kegiatan					22,230,058,158	20,697,435,356	93.11	100		

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan DPMPSTP Triwulan IV Tahun 2025

Penghargaan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Di tahun 2025 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan mendapat juara 3 Nasional Penilaian Kinerja PTSP dan PBB hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut kinerja tahun 2024. Untuk wilayah Sumatera, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan mendapat juara 1. Prestasi Lainnya adalah menjadi juara 1 stand terbaik pada pameran 13th Bandung Indonesia Tourism Trade Investment Expo yang dilaksanakan pada 24-27 Juli 2025 di Cihampelas Walk Bandung, Jawa Barat. Selain itu, DPMPTSP Prov. Sumsel juga menjadi juara stand terbaik di bidang informasi pada ajang yang sama di kota Batam yang diselenggarakan pada 13-16 November 2025 di Nagoya Hills Shopping Mall Batam.



Gambar 3. 11
Sertifikat Juara 3 Nasional penilaian kinerja PTSP
PBB hasil monitoring dan evaluasi



Gambar 3.12
Sertifikat Juara 1 Stan Terbaik dalam acara Pameran 13 Tahun 2025
Bandung Indonesia Tourism Trade Investment Expo



Gambar 3.13
Juara Stand terbaik di bidang informasi pada ajang yang sama di
Kota Batam

Tindak lanjut Evaluasi Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada Tabel 3.20 sebagai berikut di bawah ini :

Tabel 3.20
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP Provinsi Sumsel Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Komponen pada SAKIP	Rencana aksi/langkah Kerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Dukung (Upload)	Anggaran (Rp)	WAKTU				WAKTU PELAKSANAAN	KONDISI SETELAH TINDAK LANJUT	OUTPUT / HASIL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
							TW I	TW II	TW III	TW IV					SELESAI	DALAM PROSES	BELUM
1	Melakukan perencanaan anggaran yang mendukung kinerja dapat dilihat pada Dokumen Renja DPMPTSP Tahun 2024	Perencanaan	Kami Telah menyusun Renja Tahun 2024	- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	https://drive.google.com/drive/folders/1Cf69shVHtRNuHmHCxWlqLTPINr6k4GYb?usp=drive_link	15,000,000					Tahun 2024	Penyelarsan Data Dukung	Sesuai dengan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	Sekretaris DPMPTSP dan Ketua Pokja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v		
2	Melakukan perbaikan kualitas implementasi SAKIP sebagai wujud telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Pengukuran	melakukan rapat internal Pimpinan dan staf	- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	https://drive.google.com/drive/folders/1Fp8PpTpzVXvOCefagxfmrIU8XUIKE3e?usp=drive_link	15,000,000	v				Februari 2025			Kepala Dinas DPMPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPTSP	v		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Komponen pada SAKIP	Rencana aksi/ langkah Kerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Dukung (Upload)	Anggaran (Rp)	WAKTU				WAKTU PELAKSANAAN	KONDISI SETELAH TINDAK LANJUT	OUTPUT / HASIL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
							TW I	TW II	TW III	TW IV					SELESAI	DALAM PROSES	BELUM
3	Manfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai sarana perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kerja	Pengukuran	melakukan rapat internal Pimpinan dan staf	- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	https://drive.google.com/drive/folders/1GK6JdbyPHT-APOONtYmUbSRk8Zi5NZ2s?usp=drive_link	15,000,000	v				Februari 2025			Kepala Dinas DPMPPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPPTSP	v		
4	Melakukan perbaikan kualitas implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja internal dilingkungan unit kerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	melakukan rapat internal Pimpinan dan staf	- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	https://drive.google.com/drive/folders/1zs-8_HGhB3IGDyqD2pUzqycUQicapLeR?usp=drive_link	15,000,000	v				Februari 2025			Kepala Dinas DPMPPTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMPPTSP			

5	meningkatkan an evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan tidak hanya sebatas pembahasa n/analisis terhadap dokumen tasi tetapi juga menggunak an teknik lainnya	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi SKPD	https://drive.google.com/drive/folders/1hD4Y4YaUm2d3br_21uaYMLzF-kxGWHyl?usp=drive_link	15,000,000										Kepala Dinas DPMTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMTSP			
6	Agar melaksanakan an hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai sarana perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Telah melakukan implementa si sakip dimanfaatk an untuk mendukung efektivitas dan efiseinsi kinerja dalm mencapai target iku indikator realisasi investasi baik PMA maupun PMDN		https://drive.google.com/drive/folders/1YYnABQkeNwIRXViZ11WhUk0ZH3NUlOI?usp=drive_link		v									Kepala Dinas DPMTSP, Sekretaris, Tim Sakip, Tim Penilai SAKIP DPMTSP			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

7	Agar hasil dari tindak lanjut dari rekomendasi dalam LHE AKIP ITDA 2023 pada DPMPTSP dapat dilihat dari perbaikan kinerja penyusunan PK tahun 2024	Evakuasi Akuntabilitas Kinerja Internal	kami Telah menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2024	- Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	https://drive.google.com/drive/folders/1Ov_12AZ8PSnxnf9e-allYyh4gPFa4gB3?usp=drive_link	15,000,000	v				Januari 2025	Telah menyusun PK Pejabat Struktural, JFU	Melaksanakan Tusi sesuai dengan dengan PK	Seluruh ASN DPMPTSP Sumsel	v		
8	Hasil dari evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dapat dilihat pada dokumen LKjIP halaman 53 dan 54 tentang penghargaan kinerja DPMPTSP peringkat 4 nasional	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Telah melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha, yang mana telah mendapatkan peringkat 3 Nasional dalam Penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) dari Presiden Republik Indonesia	- Program : Pelayanan Penanaman Modal - Kegiatan: Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	https://drive.google.com/drive/folders/1vxql6ch-5qH-f9qqTPRfHZOPKsnlmPbq?usp=drive_link	225,000,000	v				Tahun 2024	mendapatkan Peringkat III nasional atas Anugerah layanan Investasi Tahun 2024 dari Kementerian Intasi	Penghargaan	Kepala DPMPTSP , Sekretaris DPMPTSP, Tim Sakip dan Tim Penilai Mandiri Sakip	v		

Tabel 3.21
Rekomendasi, Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2026

Rekomendasi	Rencana Aksi	Langkah Kerja	Output/ Hasil
Tujuan dan Sasaran dalam dokumen perencanaan jangka pendek agar lebih menggambarkan kondisi kinerja yang ingin dicapai secara jelas dan terukur	DPMPTSP Provinsi Sumsel telah merumuskan tujuan dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur, dan menyelaraskan antara dokumen perencanaan jangka pendek (Renja 2026) dengan dokumen jangka menengah (Renstra DPMPTSP 2025 - 2029).	1 Mereview atau mengevaluasi dokumen Renja 2026 dan menyelaraskan dengan Dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	Renstra DPMPTSP Tahun 2025 - 2029 Dokumen evaluasi / review Renja 2026-Renstra 2025-2029
		2 Mereview atau mengevaluasi serta menganalisa penyelarasan Rencana Kerja Tahun 2025, 2026 dan Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra 2025-2029) Dokumen Renja Tahun 2026 dengan Dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	Dok review evaluasi Renja Tahun 2025-2027 dengan Renstra 2025-2029
		3 Melengkapi dokumen perencanaan RKA 2026 dengan KAK/TOR dan rencana anggarakan kas	Contoh sample Dokumen RKA, KAK dan angkas Tahun 2026
		4 Menetapkan tujuan dan indikator pencapaian tujuan OPD dalam dokumen Renstra OPD sebagai IKU OPD yang akan dicapai secara bertahap (renja tahunan) selama lima tahun perencanaan strategis OPD	Cascading, IKU Kadis/ PK Kadis 2026, IKU, IKK 5 Tahun
		5 Melakukan evaluasi RKA/DPA Tahun 2026 agar sesuai penetapan Renja 2026 dengan indikator sesuai Kepmendagri 800.1.-2850 dan Renstra DPMPTSP 2025-2029, dan akan diselaraskan dan disempurnakan pada usulan APBD perubahan tahun 2026	Evaluasi tabel indikator kinerja Renja 2026 dengan Renstra OPD dan Rencana perbaikan indikatot di APBD Perubahan 2026
Setiap pegawai hendaknya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Seluruh pegawai Dpmptsp Provinsi Sumsel telah berkomitmen dalam pencapaian kinerjanya masing-masing melalui Perjanjian Kinerja (PK Tahun 2026), dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	1 Setiap ASN DPMPTSP Provinsi Sumsel telah melakukan dialog kinerja dengan pejabat penilaiannya (atasan langsung) masing-masing yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja PK Tahun 2026	Laporan penyusunan PK Dpmptsp dan dokumentasi
			Tagging Perjanjian Kinerja 2026
			PK ASN Dpmptsp Tahun 2026

	bersinergi mewujudkan tujuan sasaran strategis DPMTSP	2 Melakukan pelaporan kinerja per hari pada E-kinerja BKN dan menyampaikan laporan kinerja per bulan kepada pimpinan (pejabat penilai) sebagai bentuk evaluasi kinerja terhadap target kinerja yang dicapai.	Dokumen Ekinerja pegawai Photo screenshot laporan kinerja harian BKN dan photo screenshot laporan kinerja bulanan
			Rekap laporan kinerja ASN Dpmtsp perbulan
		3 DPMTSP melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja setiap pegawai dengan memberikan apresiasi dan sanksi.	Rekap Ekin seluruh pegawai
			Laporan kinerja pegawai Dpmtsp Triwulan I Tahun 2026
Menggunakan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	DPMTSP telah melakukan pemetaan sasaran dan indikator kinerja dan menganalisis data kinerja yang bersesuaian untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	1 Melakukan analisis dan evaluasi sasaran strategis dan indikator pengukuran capaian kinerja dalam dokumen perencanaan Renstra DPMTSP tahun 2025-2029 pada penyusunan pelaporan kinerja	Dokumen analisis capaian indikator kinerja OPD
		2 Menetapkan standar pengukuran capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja yang terukur beserta data dukung yang dibutuhkan	Dokumen Standar pengukuran indikator kinerja strategis
		3 Melakukan evaluasi secara berkala capaian kinerja sasaran strategis dan indikatornya dengan data dukung yang relevan	Laporan kinerja per triwulan pertim kerja dan OPD

Setiap unit/satuan kerja hendaknya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerjanya	DPMPTSP telah berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian setiap unit/satuan kerja (Tim kerja) terhadap hasil pengukuran kinerjanya masing-masing maupun kinerja perangkat daerah melalui pembinaan internal OPD	1	Mengajak seluruh unit/satuan kerja (Tim Kerja) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	SK Tim Tim kerja DPMPTSP Tahun 2026, SK Tim kerja Renstra, Renja 2026
				Notulen Rapat pembahasan Renstra
		2	Melaksanakan pembinaan bimbingan teknis kepada seluruh tim kerja tentang implementasi tujuan, sasaran strategis (Pohon Kinerja - Cascading) OPD terhadap pencapaian kinerja dan indikatornya dengan nara sumber dari Bappeda Prov. Sumsel	Notulen pembinaan bimtek, sosialisasi penyusunan PK 2026 dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
		3	Melaksanakan rapat koordinasi/diskusi internal DPMPTSP dalam penyusunan tujuan, sasaran strategis (Pohon Kinerja - Cascading) OPD dengan melibatkan seluruh unit/tim kerja	Notulen rapat pembahasan penyusunan pohon kinerja-Cascading dengan tim kerja masing-masing
		4	Mengintruksikan (Memo Dinas) setiap Tim Kerja melaporkan hasil pencapaian kinerjanya setiap triwulan kepada Kepala DPMPTSP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.	Instruksi (Memo Dinas) Pelaporan kinerja Laporan kinerja triwulan dari tim kerja dengan nota dinas
Agar seluruh pegawai peduli terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja	DPMPTSP telah berupaya meningkatkan kepedulian pegawai terhadap kualitas informasi yang disajikan dalam laporan kinerja melalui pembinaan internal SDM secara berkala maupun pendampingan langsung/personal.	1	DPMPTSP telah menyusun Standar operasional prosedur (SOP) pelaporan kinerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku	Standar operasional prosedur (SOP) pelaporan kinerja pegawai Surat edaran kadis tentang pelaporan kinerja
		2	DPMPTSP telah melaksanakan pembinaan internal pegawai ASN tentang pelaporan dan penyajian data kinerja yang berkualitas	Arahan Kepala Dinas
		3	Melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap penyajian data dan informasi dalam laporan kinerja yang disusun berdasarkan Standar yang telah ditetapkan	Dokumentasi pemeriksaan laporan kinerja pegawai

Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan oleh APIP dalam peningkatan implementasi SAKIP	DPMPTSP telah menindaklanjuti rekomendasi APIP melalui implementasi SAKIP OPD	1.	Identifikasi rekomendasi hasil evaluasi APIP	Laporan hasil identifikasi
		2	Menyusun rencana Tindak lanjut (RTL)	Dokumen RTL
		3	Pelaksanaan RTL	Laporan pelaksanaan RTL
		4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTL	Laporan Monitoring evaluasi (Monev) pertriwulan (laporan Konsolidasi dan capaian realisasi triwulan IV Tahun 2025)
		5	Perbaikan hasil Monev RTL	Dokumen Rencana perbaikan hasil monev RTL
		6	Penyelenggaraan SAKIP	Laporan Monitoring evaluasi (Monev) pertriwulan (laporan Konsolidasi dan capaian realisasi triwulan IV Tahun 2025)
		7	Dpmptsp telah menyusun LKJIP Tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan APIP sesuai PermenPNRB Nomor 53 Tahun 2014 peraturan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Dokumen Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025
Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Dpmptsp telah melakukan perbaikan implementasi SAKIP untuk pencapaian kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis OPD dengan memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP.	1	Menganalisis LHE akuntabilitas kinerja dari APIP dan menyusun RTL	Perbaikan dokumen perencanaan , Dokumen RTL
		2	Integrasi RTL dalam dokumen rencana operasional SAKIP	Dokumen pemetaan RTL dengan SAKIP
		3	Implementasi SAKIP untuk perbaikan kinerja yang lebih efektif dan efisien	Laporan progres SAKIP OPD
		4	Penguatan sistem pengendalian internal OPD	Dokumen penguatan dan implementasi SAKIP OPD
		5	Pelaporan capaian kinerja perangkat daerah secara berkala (triwulan) berdasarkan laporan capaian kinerja pertriwulan setiap unit/tim kerja.	Laporan Kinerja Pertriwulan Pokja-pokja (Laporan Triwulan IV Tahun 2025) dan Draft Laporan Triwulan Pokja-pokja Tahun 2026 sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014